

MEMBANGUN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CIKOLE, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT

¹Hilwati Hindersah, ²Nia Kurniasari, ³Ira Safitri, dan ⁴Hani Burhanudin

^{1,2,3,4}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UNISBA, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹hilwati@gmail.com, ²nia_kurniasari92@yahoo.com, ³pithok.vie@gmail.com, ⁴hani_burhan66@yahoo.com

Abstrak. Indonesia merupakan Negara berkembang yang kualitas taraf hidup masih perlu ditingkatkan sehingga setara dengan bangsalainnya. Oleh karena itu, menyiapkan masyarakat desa agar lebih berdaya menjadi mutlak adanya. Sebuah peluang bagi Unisba dan Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk bersama-sama membangun kader-kader pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang siap membantu dan memfasilitasi kebutuhan dan keinginan masyarakat di desanya. Dengan menggunakan Metode Andragogi dan Pedagogi pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ini dilaksanakan. Ketertarikan peserta terhadap perencanaan pembangunan desa sangat tinggi.

Kata kunci: Kader, Pemberdayaan, Masyarakat, Pembangunan

1. Pendahuluan

Perubahan paradigma berfikir mengenai pola perencanaan desa, pola pembangunan desa pada masyarakat perdesaan yang setiap hari hidup di desa adalah suatu keharusan. Hal ini berkaitan dengan semakin majunya informasi sehingga masyarakat memerlukan kepekaan dalam menghadapi dan menyikapi arus informasi dan era globalisasi.

Di pihak lain, Indonesia merupakan Negara berkembang yang oleh Negara maju lebih dikenal sebagai Negara dunia ketiga yang secara kualitas taraf hidup masih perlu perjuangan agar mampu meningkat dan setara dengan bangsa lainnya. Oleh karena itu, menyiapkan masyarakat desa agar lebih berdaya menjadi mutlak adanya. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang difasilitasi pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kedua peraturan tersebut menginginkan peran serta optimal dari masyarakat desa untuk membangun desanya dan negaranya. Peran partisipatif yang harus diaplikasikan oleh masyarakat di perdesaan tentu tidak akan timbul dengan sendirinya, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh USAID padatahun 2004 “sebenarnya masyarakat di perdesaan telah mengetahui peran-peran partisipatif dilingkungannya. Hal ini ditandai dengan masih kentalnya budaya gotongroyong di perdesaan” tetapi masyarakat mayoritas tidak mengetahui bahwa itu adalah bagian dari partisipasi.

Berdasarkan alasan diatas maka tim terpanggil mengadakan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, tentu hal ini memberikan peluang bagi Unisba dan Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk bersama-sama membangun kader-kader pemberdayaan dan pembangunan desa yang siap membantu dan memfasilitasi kebutuhan dan keinginan masyarakat di desanya.

1.1 Perumusan Masalah dan Tujuan

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat menjadi stimulan bagi perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat dan desa. Oleh karena itu permasalahannya adalah “Bagaimana menciptakan kader-kader desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, Untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif?”

Tujuan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Menciptakan kader-kader desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- b. Menciptakan kader-kader desa yang bertanggungjawab terhadap desa, kecamatan, kabupaten, provinsidan Negara.
- c. Menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi desa sehingga tercipta desa yang maju dan mandiri.
- d. Menggali dan mengoptimalkan badan usaha milik desa.

Sedangkan urgensi penyelenggaraan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Mencetak kader desa yang peduli, mandiri dan kreatif,
- b. Mendorong terwujudnya desa maju dan mandiri.

2. Kajian Pustaka

Sebagai Landasan hokum tentang pentingnya penyelenggaraan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 32 Tahun 2006 Administrasi Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
- f. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Beberapa pengertian yang dianggap penting dan memiliki korelasi yang kuat terhadap materi pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

3. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. (PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).
4. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. (PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat).
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. (PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat).
6. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan perantara seluruh lapisan masyarakat. (PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat).
7. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. (PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat).

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan partisipasi masyarakat dalam membangun desa agar tercipta kader-kader desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif adalah dengan cara memberi Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, melalui :

Pertama, pendekatan Metode Andragogi (Pendidikan Orang Dewasa) disampaikan agar peserta mengetahui potensi dasar dirinya dan untuk merangsang peserta dalam proses akulturasi pemikiran dan bahkan budaya.

Kedua, Metode Pedagogi yaitu penyampaian materi melalui kuliah, diskusi dan studi lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Survey Pendahuluan: Kordinasi Lapangan

Hasil dan pembahasan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cikole ini akan dijelaskan sesuai agenda lapangan, kecuali untuk tahap awal (koordinasi) yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 dan 08 Mei 2014.

1. Koordinasi pertama (02 Mei 2014):

Ditujukan untuk pemberitahuan kegiatan yang akan dilakukan kepada aparat Desa Cikole. Hasilnya kegiatan ini diterima dengan baik dan segera dikoordinasikan dengan Kepala Desa Cikole

2. Koordinasi kedua (08 Mei 2014):

- Pertemuan resmi team PKM Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cikole dengan Kepala Desa Cikole
- Survey awal untuk mengetahui kondisi real Desa Cikole meliputi semua RW (survai scanning).
- Koordinasi untuk peserta KPM dan acara pelatihan mulai dari tahap awal- akhir

Ruwat Desa

Acara ruwat desa dilakukan di Dusun Cibedug (RW 13) dan merupakan acara seni budaya “Sunda Wiwitan” yang dilakukan setahun sekali. Team diundang secara langsung oleh kepala desa dan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat. Inti dari acara ini adalah syukuran atas hasil panen selama setahun. Masyarakat antar RT bertukar makanan (nasi tumpeng) beserta lauknya. Terdapat acara kesenian sunda termasuk angklung, malam hiburan, dan pawai.

4.2 Tahapan Pelatihan**Pelatihan Tahap 1**

Sebelum pelatihan dimulai dilakukan pretest bagi calon kader pemberdayaan masyarakat di Desa Cikole.

Hasil kuesioner terhadap 20 orang yang mewakili kader Desa Cikole diperoleh kesimpulan mengenai potensi kader dan kesiapannya dalam mengikuti pelatihan kader, yaitu sebagai berikut :

- a. Rata-rata para peserta sudah pernah mendengar istilah KPM (50%), dan 30% dari peserta yang pernah mendengar KPM tersebut diperoleh setelah mengikuti Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Lembang.
- b. 20% kader yang mengikuti pelatihan kali ini memahami fungsi KPM namun baru 15% peserta yang memahami tugas dan peran KPM tersebut
- c. Terkait proses perencanaan pembangunan, 55% peserta yang ikut pelatihan menganggap biasa saja dalam pengertian kalau dirasa perlu mereka ikut terlibat tapi kalau tidak ya diam saja.
- d. Dalam hal pencapaian pembangunan, 60% peserta menyatakan kesadaran masyarakat sebagai kendala dalam proses pembangunan dan mereka menyatakan aspek sanitasi (sampah dan limbah) serta air bersih sebagai persoalan utama yang perlu segera dituntaskan.
- e. Harapan para kader setelah mengikuti pelatihan ini adalah disamping ingin menambah ilmu, mereka juga ingin menjadi penggerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa yang mandiri disertai peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggi
- f. Terkait masa depan Desa Cikole yang diinginkan para peserta, 85% menginginkan terciptanya desa yang nyaman, asri dan bersih.

Animo peserta dalam mengikuti pelatihan ini sangat responsif, semangat, dan rasa ingin tahunya sangat tinggi terhadap proses perencanaan pembangunan di desa. Peserta berlatih membuat keputusan bersama mengenai penentuan lokasi untuk latihan Survey Kampung Sendiri (SKS), membuat skala prioritas pembangunan desa dan identifikasi lokasi-lokasi prioritas pembangunan.

Pelatihan Tahap 2

Pada tahap ini materi yang disampaikan berupa pembekalan bagi para kader dalam menyusun perencanaan pembangunan, pembekalan untuk praktek membangun desa sehat dan mandiri serta penayangan contoh kasus desa yang telah berhasil dalam menyusun rencana tata ruangnya sendiri.

Pelatihan Tahap 3

Materi pelatihan difokuskan pada survey lapangan untuk menemu kenali potensi dan masalah di RW 04 yang menjadi daerah sampel pelatihan. Pemilihan RW 04 sebagai daerah sampel adalah hasil kesepakatan para peserta pelatihan yang dipimpin kepala BPM. Jumlah peserta pelatihan yang terdiri dari 20 orang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. Setiap kelompok dilengkapi dengan perangkat survey seperti peta, papan berjalan, alat tulis, dan kamera.

Setiap kelompok akan dipandu oleh anggota team PKM untuk mengelilingi RW 04, memetakan potensi, masalah, peluang, dan ancaman nyata terhadap pembangunan di Desa Cikole khususnya RW 04. Hasil survey berupa peta dan catatan dibawa pulang oleh setiap kelompok untuk disusun, dibahas, dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya.

Pelatihan Tahap 4

Pada pertemuan ini para kader duduk berdasarkan kelompoknya dan mempresentasikan hasil survey pada pertemuan sebelumnya. Semua acara dipandu oleh kader dengan tujuan melatih para kader untuk terbiasa memimpin acara resmi dalam merencanakan pembangunan di Desa Cikole. Anggota kader yang tidak presentasi menanggapi dan memberikan masukan terhadap hasil temuan kelompok lainnya. Output dari pelatihan tahap 3 dan 4 ini berupa peta hasil coretan masing-masing kelompok.

Dari hasil survey semua team KPM di RW 14 diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan yang mendesak untuk segera ditanggulangi adalah:

- a. Masalah pengolahan sampah yang semakin hari semakin meningkat
- b. Masalah sistem perpipaan air bersih dan peningkatan kualitas air
- c. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
- d. Perbaikan tanggul desa
- e. Pembuatan jembatan penyeberangan pada jalur jalan Subang – Lembang.

5. Kesimpulan dan Saran

Stakeholder pembangunan di Desa Cikole memahami dan menyadari sepenuhnya akan urgensi pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) ini. Ketertarikan peserta pelatihan terhadap penataan perencanaan pembangunan desa sangat tinggi terutama dalam persoalan pembiayaan pembangunan dan masalah pengelolaan sampah, limbah dan penyediaan air bersih.

Ketokohan seperti tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh agama, tokoh pengusaha lokal dan tokoh masyarakat lainnya dalam membangun Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sangat penting. Peran tokoh ini dapat menguatkan kapasitas KPM sekaligus mengefektifkan fungsi peran yang disandangnya.

Selain itu kader yang dipilih harusnya lebih menguasai lapangan/ medan serta mampu melakukan pendekatan persuasif kepada anggota masyarakat lainnya. Kader juga harus menjadi panutan bagi anggota masyarakat lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Islam Bandung yang telah memberi dana untuk kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan atas terlaksananya acara Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2014 ini dan kepada pihak Panitia Prosiding atas kerjasamanya untuk memuat makalah ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Cikole yaitu Bapak Jajang Ruhiyat, S.Ip. yang telah mendukung dan memfasilitasi Kegiatan pelatihan ini.

Daftarpustaka

- Forum Perencanaan Pembangunan Cianjur - FP2C. (2008). *Laporan Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Cianjur.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 32 Tahun 2006 *Administrasi Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 66 Tahun 2007 tentang *Perencanaan Pembangunan Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 7 Tahun 2007 tentang *Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*
- Surjadi, A. (1973). *Da'wah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.*
- Wasistiono, Sadu. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Penerbit CV. Fokusmedia.